



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum.....	3
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.	Sistematika.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2.	Sumber Daya.....	11
2.3.	Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	14
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	28
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	28
3.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPSD Provinsi Kaltim 2024-2026.....	30
3.3	Telaahan RPJMN dan Renstra K/L	31
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS	32
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1	Tujuan	34
4.2	Sasaran.....	34
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	66
BAB VIII	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

2.1	Keahlian/Kepakaran dari Jabatan Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	12
2.2	Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS dan Tenaga Teknis/Non Teknis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	13
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	14
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023	15
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023	20
2.6	Arah Kebijakan, Tantangan dan Peluang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah	24
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur	28
3.2	Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan RPD Provinsi Kaltim 2024-2026	30
4.1	Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan	35
4.2	Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Non Urusan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur	35
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	36
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026	53
7.1	Indikator Kinerja Balitbangda Prov. Kaltim yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Prov Kaltim 2024 – 2026	66

DAFTAR GAMBAR

1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	2
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2	Tingkat Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	11
2.3	Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	12
5.1	Tujuan, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Nopember 2024, dan Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023, sehingga masa berlaku RPJMD Provinsi Kalimantan Timur akan berakhir di tahun 2023. Menjelang Pilkada serentak tahun 2024 nantinya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum daerah otonom telah menerbitkan Kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai panduan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di masa transisi.

Masa transisi bagi pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan menengah daerah. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi para pejabat kepala daerah, dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi para kepala perangkat daerah.

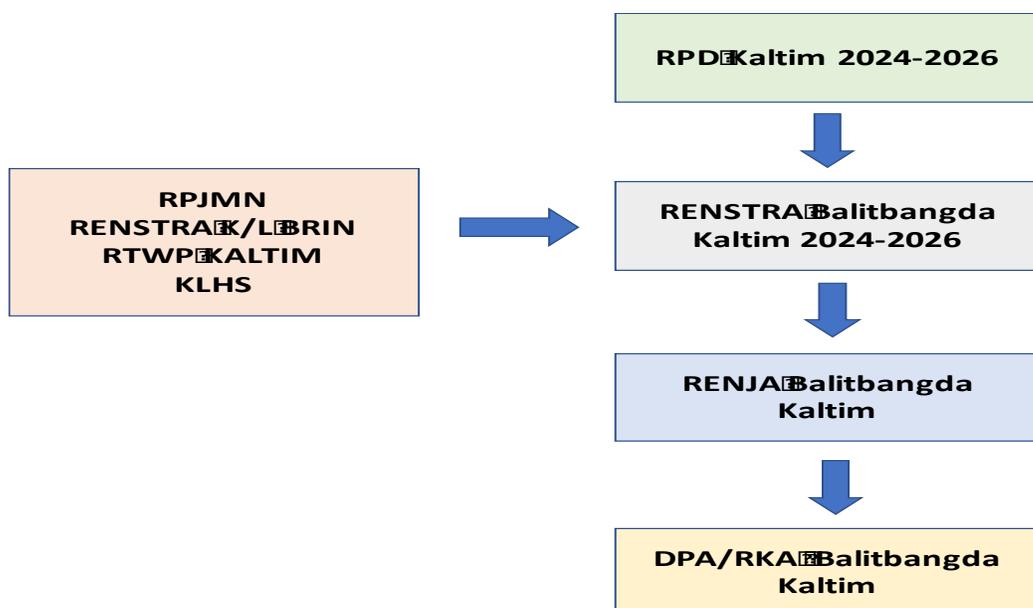
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya sesuai amanat Undang Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim saat ini dalam proses percepatan transformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Timur. Kelembagaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) memiliki lingkup penelitian dan pengembangan menjadi lebih luas, semula meliputi penelitian dan pengembangan, saat ini akan menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan evaluasi kebijakan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim menyusun Rencana Strategis untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempedomani tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selain itu, dokumen Renstra disusun dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim, dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan tematik riset dan inovasi dengan sasaran prioritas pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Renstra tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Arah dan Kebijakan Riset dan Inovasi; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan kerangka anggaran.

Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan selama periode tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab yang diemban sesuai tugas dan fungsi Pegawai Balitbangda Provinsi Kaltim yang sesuai dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Provinsi Kaltim tahun 2024-2026.
2. Memberikan arahan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan komitmen target kinerja yang disepakati ingin dicapai (*performance agreement*) dalam periode tahun 2024-2026.
3. Menjadi acuan untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran.
4. Menjadi acuan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan dengan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri atas delapan bab, sistematika penulisannya dapat disajikan seperti berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat sumberdaya organisasi, kondisi capaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan badan, telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kaltim, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan serta sebagai alat ukur kinerja untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan, harapan dan komitmen terhadap Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

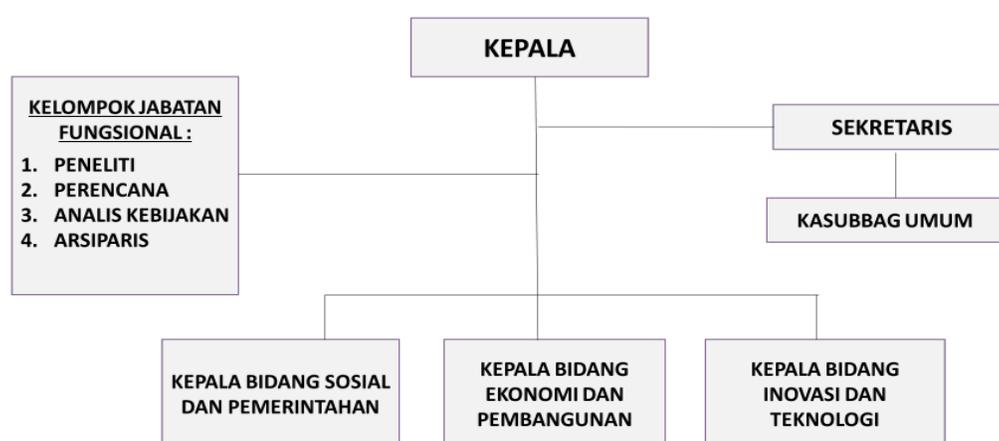
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang serta Rumpun Jabatan Fungsional Peneliti.

STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA KALTIM



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur** mempunyai tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonotujuanmi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelasanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2) **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. Disamping itu juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengeloan aset.

3) **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) **Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

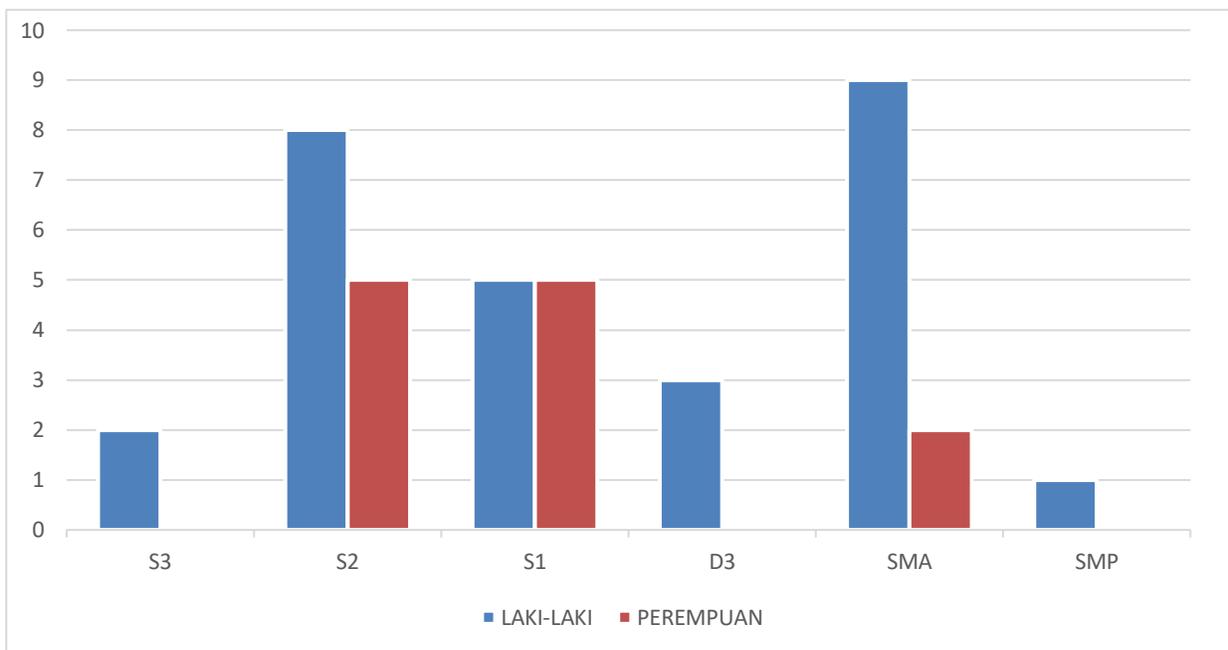
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Peneliti, Fungsional Analis Kebijakan, Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah, Fungsional Litkayasa, Fungsional Perencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai peraturan ketentuan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

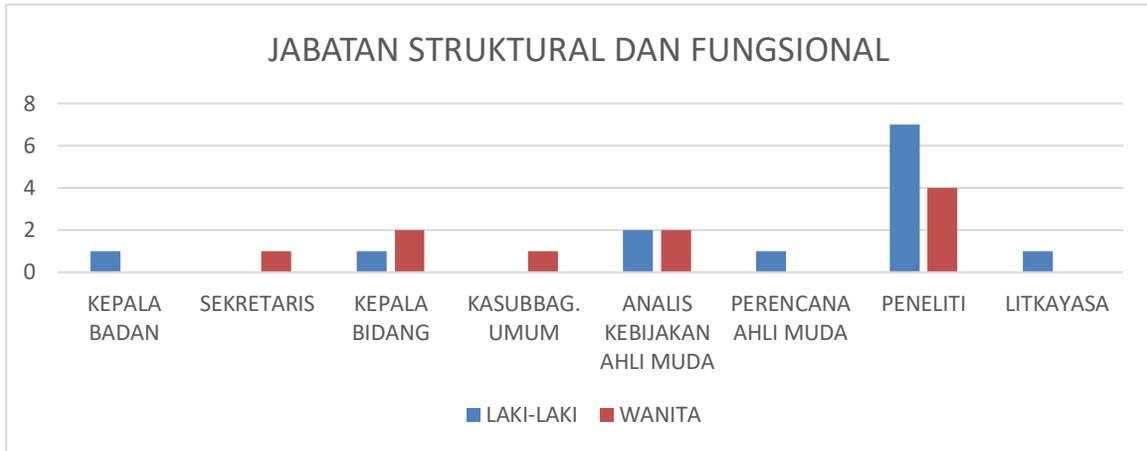
Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 43 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar berikut :



Gambar 2.2 Tingkat Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

Keterangan : Tingkat pendidikan S3 : 1 (satu) orang, S2 sejumlah 8 (delapan) orang, S1 sejumlah 19 (sembilan belas) orang, D3 sejumlah 3 (tiga) orang, SMP sejumlah 1 (satu) orang

SDM yang mendududuki jabatan struktural dan fungsional



Gambar 2.3 Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

SDM ASN yang menduduki jabatan struktural sejumlah 6 (enam) orang terdiri kepala badan, sekretaris, kepala bidang (sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, kepala bidang inovasi dan teknologi), kepala sub bagian umum. Jabatan fungsional 20 (dua puluh) orang terdiri dari analis kebijakan ahli utama 1 (satu) orang, analis kebijakan ahli muda 5 (lima) orang, penata penerbitan ilmiah ahli muda 1 (satu) orang, perencana ahli muda 1 (satu) orang, peneliti 12 (dua belas) orang. Adapun kepakaran dari fungsional peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keahlian/Kepakaran dari Jabatan Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

No.	Nama	Jabatan	Kepakaran
I. Bidang Ilmu Teknik			
1.	Dr. Ari Sasmoko Adi, ST.,M.T.	Peneliti Muda/IIIId	Teknik Transportasi Jalan
2.	Puput Wahyu Budiman, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Perencanaan Wilayah
3.	Zhikry Fitriani, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Manajemen Industri
4.	Suharsono, ST	Peneliti Pertama/IIIa	Teknik Lingkungan
5.	Muhammad Setiawan Prabowo, A.Md	Teknisi Penelitian Perekayasaan	Teknik Sipil
II. Bidang Ilmu Alam			
1.	Hj. Eka Nor Santi, SP, MP	Peneliti Muda/IIIId	Sistem UsahaPertanian
2.	Noor Wahyuningsih, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Kebijakan Publik
3.	Mardiany, S. Hut, M.Si	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
III. Bidang Ilmu Sosial			
1.	Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	Peneliti Muda/IIIId	Kebijakan Ekonomi
2.	Adi Hendro Purnomo, S.IP, MAP	Peneliti Muda/IIIId	Administrasi Publik
3.	Ratih Fenty Anggriani Bintoro, SAP, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
4.	Yuli Fitrianto, S.Sos, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Politik dan Pemerintahan
5.	Pebiansyah Hapsari, SH, MH	Peneliti Pertama/IIIa	Hukum Tata Negara

Sumber : DUK Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2023

Komposisi pangkat dan golongan/ruang PNS dan Tenaga Teknis/Non Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2023, tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS
dan Tenaga Teknis/Non Teknis Balitbangda Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Utama	IV/e	1
2	Pembina Utama Madya	IV/c	1
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3
4	Pembina	IV/a	2
5	Penata Tingkat I	III/d	9
6	Penata	III/c	2
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
8	Penata Muda	III/a	1
9	Pengatur Tingkat I	II/d	5
10	Pengatur	II/c	6
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
12	Pengatur Muda	II/a	1
J u m l a h			43
13	Tenaga Teknis/Non Teknis		36

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dan fungsi Badan litbang adalah sebagai berikut :

- Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi *meubelair* dan *Audio Visual System*
- Ruang rapat staf lengkap dengan *meubelair*
- Ruang Peneliti
- Ruang Diseminasi Kelitbangan
- Ruang Satpam
- Jaringan Internet
- Gudang
- Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
- Notebook, PC dan Printer
- Sarana Dokumentasi
- Televisi

- Layar persentasi/LC
- Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dari target kinerja 72% terealisasi sebesar 79%, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja utama berada pada kategori **Tinggi** dengan tingkat capaian kinerja 110%, atau lebih dari 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut tercapai melampaui target karena dari 71 hasil kelitbangan tahun 2020-2022 yang dimanfaatkan, tercapai sejumlah 78 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mencapai kategori sangat baik dengan nilai 82,06. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	77 B	61,26 B
2.	Sasaran : Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	%	72	79
3.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	%	72	59
		Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan Untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	%	63	73
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan publik pada tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	97	97

Sumber : SAKIP Tahun 2022

Tabel. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%			100	100	100	100	100		100	100	
2	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
3	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
4	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
5	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
6	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan			2	2	2	2	2		100	100	

7	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%			100	100	100	100	100		100	100	
8	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
9	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
10	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	%			100	100	100	100	100		100	100	
11	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
12	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
13	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
14	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan			1	0	0	1	0		100	100	
15	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Laporan				0	0		0		100	100	
16	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Laporan			1	0	0	1	0		100	100	
17	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
18	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
19	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
20	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	

21	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
22	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
23	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
24	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%			100	100	100	100	100		100	100	
25	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan			2	1	1	2	1		100	100	
26	Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan	Rancang bangun			1	0	0	1	0		100	100	
27	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim	Inovasi			12	0	0	12	0		100	100	
28	Rakor Kelitbagan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
29	Jumlah hasil kelitbagan yang di Diseminasikan	Disemina si			25	0	0	25	0		100	100	
30	Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan	artikel			20	0	0	20	0		100	100	
31	Jumlah HKI yang difasilitasi	HKI			1	0	0	1	0		100	100	
32	terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	%			100	100	100	100	100		100	100	
33	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi konerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen			31	31	31	31	31		100	100	
34	Jumlah dokumenkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan			21	21	21	21	21		100	100	

35	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			10	10	10	10	10		100	100	
36	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			14	14	14	14	14		100	100	
37	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen			14	14	14	14	14		100	100	
38	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			10	10	10	10	10		100	100	
39	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai			10	0	0	10	0		100	100	
40	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
41	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen			12	12	12	12	12		100	100	
42	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis			27	0	0	27	0		100	100	
43	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			8	0	0	8	0		100	100	
44	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis			27	12	12	27	12		100	100	
45	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pegawai			358	329	329	358	329		100	100	
46	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit			56	0	0	56	0		100	100	
47	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			3	0	0	3	0		100	100	
48	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit			16	0	0	16	0		100	100	
49	jumlah mebelair yang diadakan	Unit			37	0	0	37	0		100	100	

50	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
51	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Surat			100	100	100	100	100		100	100	
52	Jumlah Pelayanan Umum Yang Dilaksanakan	Layanan			38	49	49	38	49		100	100	
53	jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, air, dan listrik	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
54	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Kegiatan			5	5	5	5	5		100	100	
55	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit			1			1			100	100	
56	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			25	27	27	25	27		100	100	
57	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit			2	2	2	2	2		100	100	
58	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit			52	0	0	52	0		100	100	
59	luas areal yang dilakukan pemeliharaan	M ²			0	7000	7000	0	7000		100	100	
60	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit			1	1	1	1	1		100	100	

Tabel. 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total Belanja	19,558,892,000	20,097,060,990	31,802,815,364	16,794,771,429	17,701,309,835		86	88		2.75	5.12
Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	867,075,500	803,660,000	2,549,781,000	783,918,864	778,913,322		90	97		(7.31)	(0.64)
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	83,100,000	312,600,000	-	64,325,800	303,674,957		77	97		2.76	78.82
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	118,250,000	27,660,000	1,643,057,000	105,497,000	27,357,000		89	99		(0.77)	(285.63)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95,900,000	41,090,000	259,032,000	87,892,000	36,789,500		92	90		(0.57)	(138.91)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	177,900,000	193,400,000	147,180,000	167,161,404	192,454,440		94	100		0.09	13.14
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	391,925,500	228,910,000	402,762,000	359,042,660	218,637,425		92	96		(0.42)	(64.22)
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	-	-	97,750,000	-	-		-	-		-	-
Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	263,100,000	624,872,000	926,470,000	250,866,610	605,296,840		95	97		1.38	58.55
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36,600,000	485,472,000	570,870,000	35,436,000	473,572,317		97	98		12.26	92.52

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	226,500,000	139,400,000	355,600,000	215,430,510	131,724,523		95	94		(0.38)	(63.55)
Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1,196,374,500	775,875,000	3,901,000,000	1,011,964,565	745,896,375		85	96		(0.35)	(35.67)
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	279,100,000		1,541,000,000	218,063,600			78	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	200,375,000	-	-	194,282,200		-	97		-	100.00
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	292,250,000	550,000,000	-	279,617,900		-	96		-	100.00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	637,184,500	-		531,082,405	-		83	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	480,000,000	-	-		-	-		-	-
Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	280,090,000	-	350,000,000	262,818,560	-		94	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	330,000,000	-	-		-	-		-	-
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	283,250,000	650,000,000		271,996,275		-	96		-	100.00
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1,180,115,000	910,973,000	4,780,618,700	921,880,100	894,822,742		78	98		(0.23)	(3.02)
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	203,500,000	910,973,000	2,021,672,500	203,119,000	894,822,742		100	98		3.48	77.30
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	158,250,000	-	744,261,000	137,694,100	-		87	-		(1.00)	-
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	398,900,000	-	1,541,543,200	343,254,000	-		86	-		(1.00)	-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	383,465,000	-	311,564,000	209,123,000	-		55	-		(1.00)	-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	36,000,000	-	161,578,000	28,690,000	-		80	-		(1.00)	-
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,950,000	961,450,400	481,290,000	38,950,000	854,038,560		49	89		11.18	95.44

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,400,000	694,575,400	401,340,000	34,400,000	665,272,000		100	96		19.19	94.83
Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	44,550,000	266,875,000	79,950,000	4,550,000	188,766,560		10	71		4.99	97.59
Administrasi Keuangan	11,038,257,632	10,246,164,396	10,036,736,114	9,283,129,400	8,393,985,068		84	82		(0.07)	(10.59)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,038,257,632	10,246,164,396	10,036,736,114	9,283,129,400	8,393,985,068		84	82		(0.07)	(10.59)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000	-	96,112,500	28,500,000			81	-		(1.00)	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35,000,000	-	96,112,500	28,500,000	-		81	-		(1.00)	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,507,343,193	2,634,590,960	3,870,311,650	2,311,067,427	2,500,750,671		92	95		0.05	7.59
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81,275,568	186,985,000	208,495,750	80,794,800	132,212,700		99	71		1.30	38.89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,090,395	-	19,121,100	18,585,240	-		97	-		(1.00)	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,007,200	-	48,492,400	12,315,500	-		88	-		(1.00)	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,999,925	112,671,000	34,620,400	34,954,550	101,093,000		87	90		1.82	65.42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,352,970,105	2,334,934,960	3,559,582,000	2,164,417,337	2,267,444,971		92	97		(0.01)	4.54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310,452,500	-	1,182,666,000	258,549,500	-		83	-		(1.00)	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,800,000	-	428,814,500	49,324,000	-		99	-		(1.00)	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	186,652,500	-	685,738,900	135,685,000	-		73	-		(1.00)	-
Pengadaan Mebel	74,000,000	-	68,112,600	73,540,500	-		99	-		(1.00)	-

Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1,731,085,675	2,091,317,484	2,966,951,000	1,641,399,849	1,947,164,724		95	93		0.21	15.70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	20,000,000	17,385,000	3,180,500	11,277,000		42	56		1.67	71.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,417,354,750	1,816,980,880	2,655,845,200	1,370,130,000	1,719,769,744		97	95		0.28	20.33
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	306,230,925	254,336,604	293,720,800	268,089,349	216,117,980		88	85		(0.17)	(24.05)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351,138,000	1,048,157,750	1,010,878,400	264,545,114	980,441,533		75	94		1.99	73.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	88,350,000	188,772,350	272,124,400	56,423,665	177,849,853		64	94		1.14	68.27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	29,550,000	-	-	27,314,949	-		92	-		(1.00)	-
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	154,488,000	397,563,400	599,530,000	152,799,500	395,248,900		99	99		1.57	61.34
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35,000,000	130,000,000	10,150,000	16,632,000	-		48	-		2.71	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	98,800,000	-	128,500,000		-	-		-	100.00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	43,750,000	331,822,000	30,274,000	11,375,000	278,842,780		26	84		6.58	95.92

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi, Penataan ruang dan Lingkungan menjadi tantangan dan peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 (tiga) tahun ke depan tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Arah Kebijakan, Tantangan dan Peluang
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026 dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah

NO.	PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TANTANGAN	PELUANG
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
1.	RPJMN 2020-2024		
a.	Target Makro Pembangunan Kaltim Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,5% Tingkat Kemiskinan 3,35% Tingkat Pengangguran 10%	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif untuk mendukung pencapaian prioritas nasional terkait peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, pengembangan sektor unggulan, penguatan konektivitas infrastruktur, perdesaan dan perkotaan sekitar KN, adaptasi perubahan iklim	Pengembangan Riset dan Inovasi terkait
b.	Pengembangan sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan hilirisasi pertambangan		peluang sektor unggulan yang dapat dikembangkan,
c.	Pengembangan dan penguatan konektivitas infrastruktur, telekomunikasi dan informasi		penguatan konektivitas infrastruktur, telekomunikasi dan informasi
d.	Pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung industri manufaktur, Agrobisnis dan Agroteknologi, Industri kreatif, rekayasa teknologi, Energi dan Pertambangan		Pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung industri manufaktur, Agrobisnis dan Agroteknologi, Industri kreatif, rekayasa teknologi, Energi dan Pertambangan
e.	Pengembangan dan penguatan desa-kota terkait dengan pembangunan KN		pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan sekitar KN
f.	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim		Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
g.	Peningkatan Riset dan Inovasi Daerah		
2.	RENSTRA/LBADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL		
a.	Memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional dengan dukungan kemitraan multipihak melalui mekanisme <i>Open Platform</i> terkait SDM yang unggul, infrastruktur riset yang lebih terbuka serta pendanaan riset yang lebih kompetitif	Membangun ekosistem Riset dengan SDM yang unggul, infrastruktur dan pendanaan riset yang memadai dengan dukungan kemitraan multipihak	Pengembangan Kerjasama Riset dan Inovasi yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan yang terkait dengan bencana, pemanfaatan sumberdaya alam, pengembangan potensi kemaritiman, dan peningkatan kualitas lingkungan
b.	peningkatan kapasitas dan mobilitas periset melalui pengembangan talenta riset dan inovasi		
c.	Pengembangan kema pendanaan Riset dan Inovasi melalui keterlibatan swasta		
d.	Riset dan Inovasi difokuskan pada bidang Kebumihan dan Maritim, untuk menyelesaikan persoalan nasional khususnya dalam ketahanan bencana, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut, pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, pengelolaan sumberdaya perairan darat, pengelolaan sumberdaya geologi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup		

NO.	PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TANTANGAN	PELUANG
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	RPD Kaltim 2024-2026		
a	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif untuk mendukung pencapaian prioritas Daerah terkait peningkatan daya saing SDM, Diversifikasi ekonomi, Peningkatan tata kelola pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan penguatan daerah sebagai mitra KKN	Pengembangan Riset dan Inovasi yang difokuskan pada pencapaian target prioritas pembangunan daerah terkait peningkatan daya saing SDM, Diversifikasi ekonomi, Peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya terkait pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, transformasi pelayanan publik, dan penguatan daerah sebagai mitra KKN
b	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya;		
c	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan		
d	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
e	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem		
f	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
g			
h	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra KKN dengan mengoptimalkan kerjasama		
2.	RTRWP Kaltim dan KLHS		
	Pengembangan sistem perkotaan berbasis air untuk mendukung pengembangan industri pengolahan, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis analisis spasial terkait dengan peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan Mitigasi bencana	Pengembangan riset dan inovasi yang berbasis spasial terkait dengan peningkatan sektor unggulan daerah, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan Mitigasi bencana
	Pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan dan peningkatan kualitas dan pelayanan seluruh wilayah provinsi		
	Pelestarian kawasan berfungsi lindung dan konservasi		
	pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah bagi kesejahteraan masyarakat		
	pengembangan kawasan perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan		
	Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem		
	Pengembangan kawasan budidaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
	Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana		
	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara		

Arah Kebijakan, Tantangan dan Peluang tersebut menjadi pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah, sehingga untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut diperlukan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak sebagai Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Komitmen kerjasama Riset dan Inovasi Daerah perlu ditingkatkan baik dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi profesi, maupun badan usaha swasta, meliputi berbagai aspek sebagai berikut :

- **Aspek Organisasi dan Tata Laksana**, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Transformasi kelembagaan BRIDA Kaltim yang sedang dalam proses (telah terbit Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA Prov. Kaltim, 19 Agustus 2022), diharapkan dapat memotivasi transformasi kelembagaan BRIDA di kab/kota.
- **Aspek Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang. Seluruh pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek, meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, workshop, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, para ASN baik tingkat eselon maupun staf perlu diberikan pengetahuan dan kompetensi mengenai kelitbangan semisal dalam hal pembuatan KAK/TOR, penyusunan proposal, dan sebagainya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**, salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya. Terutama laboratorium data/pusat data litbang yang belum ada, fasilitas perpustakaan yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta fasilitas teknologi informasi yang perlu dikembangkan. Hal ini untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan.
- **Aspek Pembiayaan**, dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD, sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan pengembangan skema pendanaan melalui sumber dana lainnya dari sumber yang sah dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

- **Aspek Kerjasama,** aspek kerjasama litbang akan dikembangkan bersama dengan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Pihak Swasta, dan beberapa kementerian teknis terkait di pusat. Hal ini perlu dilakukan karena litbang di Perguruan Tinggi dan Kementrian/Lembaga di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya. Kemudian diperlukan juga kerjasama dengan donor internasional pada kegiatan riset dan pengembangan inovasi. Disamping itu, diperlukan regulasi terkait penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu yang memperkuat peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi di daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 2 (dua) permasalahan utama, sehingga ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

No.	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat	Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan	Kepedulian dan perhatian terhadap hasil kelitbangan masih rendah
			Pembinaan kab/kota belum optimal
			Kuranginya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan naskah kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan Pemprov Kaltim
		Hasil Kelitbangan belum aplikatif	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Riset
			Skema pendanaan riset yang belum memadai
			Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Riset
			kurangnya kemitraan (praktisi) dalam penelitian

No.	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>Monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan belum dilaksanakan secara periodik</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/buku/naskah akademik/ di nasional dan internasional/ prosiding</p>
2	Belum berkembangnya Inovasi Daerah	<p>Produk-produk Inovasi yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan</p> <p>Regulasi pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>Komitmen pengembangan inovasi masih rendah</p>	<p>keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan parapihak yang dibina</p> <p>Kemampuan inovator dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan parapihak yang dibina masih kurang</p> <p>Kemampuan SDM IPTEK dalam menghasilkan perekayasaan IPTEK untuk daerah masih kurang</p> <p>standart penilaian terkait indeks inovasi daerah dari pusat yg meningkat dan berubah ubah</p> <p>pemahaman terkait inovasi masih kurang</p>

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026

Telaahan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi tugas dan fungsi Balitbangda Kaltim dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026. Sesuai dengan Tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk pencapaian Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026, seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan RPD Provinsi Kaltim 2024-2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN RPD	OUTPUT TEMA RISET DAN INOVASI DARI RENSTRA	PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
P1 Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. (Sasaran 1, 3, 4)	Peran Perempuan, Anak, Lansia, Disabilitas dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan gender	1. Dampak sosial dari Bonus Demografi Lansia 2. Rendahnya Tingkat ekonomi Perempuan dan Difable
	Riset Pernikahan Dini dan Permasalahan Remaja	Darurat Remaja Menikah Dini dan dampak dari media sosial yang berimplikasi terhadap penurunan daya saing
	Relevansi Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja / daya saing tenaga kerja	Rendahnya penyerapan tenaga kerja dari alumni pendidikan lokal
P2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya. (Sasaran 2)	Penanganan Stunting	Meningkatnya stunting di Kaltim 1,1 % (dari 22,8 % menjadi 23,9 %)
	Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Kesenjangan akses pelayanan kesehatan
P3 Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. (Sasaran 5, 6)	Potensi investasi berbasis ekonomi kreatif di provinsi kaltim	Belum berkembangnya diversifikasi ekonomi yang berimplikasi terhadap melambatnya Transformasi ekonomi
	Identifikasi kinerja kelembagaan koperasi, dan pemasaran digital dalam peningkatan pendapatan UMKM di Kaltim	
	Sumberdaya wilayah untuk pengembangan industri di prov Kaltim	
	Pengembangan Model Industri pariwisata, dan analisis Pasar destinasi pariwisata di Kaltim	
	Pengembangan pertanian, dan penerapan teknologi pertanian modern di kaltim.	
	Pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di kaltim	
P5 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem (Sasaran 6)	Pengembangan UMKM dalam mengurangi masyarakat miskin di daerah perkotaan kaltim	Meningkatnya penduduk miskin perkotaan
P4 Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (Sasaran 7)	Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan di kaltim	
	Identifikasi Efektifitas Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kaltim	
P8 Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN (Sasaran 7)	Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan pada daerah mitra IKN	Masih rendahnya kesiapan daerah sebagai Mitra IKN
	Pengembangan kota Balikpapan dan Samarinda sebagai MICE City dalam mendukung IKN	
	Pengembangan kota Balikpapan dan Samarinda sebagai MICE City dalam mendukung IKN	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN RPD	OUTPUT TEMA RISET DAN INOVASI DARI RENSTRA	PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
<p>P7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. (Sasaran 11 dan 12)</p>	<p>Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang sudah ada</p>	<p>inefisiensi dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan dampak dari peraturan yang diterapkan dan yang tidak diterapkan</p>
	<p>Otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Belum optimalnya hubungan pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>
	<p>Keuangan, Aset Daerah, dan Reformasi Birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat • Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan • Masih rendahnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan. • Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pada beberapa Perangkat Daerah .

Seluruh arah kebijakan dari prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 merupakan faktor pendorong untuk peningkatan kinerja pelayanan Balitbangda di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan kinerja pelayanan Balitbangda, dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026, faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Balitbangda adalah :

- a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi
- c. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Riset dan Pengembangan inovasi.
- d. Skema pendanaan riset dan pengembangan inovasi yang belum memadai.

3.3 Telaahan RPJMN dan Renstra K/L

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah dijelaskan bahwa kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi di Indonesia masih dinilai rendah sehingga pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat Global Innovation Index 85 dari 129 negara. Namun, pada tahun 2021 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 87. Kondisi ini tentunya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BRIN dan beberapa kementerian/lembaga lain yang mendukung tercapainya indikator terkait Global Innovation Index dalam menetapkan strategi kedepannya, karena meskipun infrastruktur iptek strategis serta persentase sumber daya manusia iptek berkualifikasi S3 mengalami peningkatan namun nyatanya belum mampu mendorong peningkatan ekosistem riset sepenuhnya sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat.

Oleh karena itu, infrastruktur sektor iptek yang telah terbangun, dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi serta dukungan sumber daya iptek lainnya perlu dimaksimalkan kebermanfaatannya sehingga dapat mendukung perwujudan ekosistem riset sebagaimana yang diharapkan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai badan otonom baru yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi nyata sektor iptek terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan tugas dan fungsi BRIN adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BRIN berusaha menyiapkan strategi yang tepat untuk menghasilkan keluaran riset dan inovasi yang lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam menjawab kebutuhan Indonesia serta menjadi dasar kuat dalam mendukung upaya transformasi ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan hal tersebut, BRIN menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2022-2024 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BRIN yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu kebijakan yang digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ruang dan wilayah tersebut.

Arahan dari penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek menjadi penting sebagai acuan dalam menetapkan peruntukkan ruang dan wilayah, sehingga peruntukkan ruang dan wilayah tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara subjektif, namun ditetapkan secara objektif berdasarkan potensi dan kehandalan sumber daya yang dimiliki di masing-masing ruang atau wilayah.

Kebijakan RTRWP dan KLHS merupakan faktor pendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk berperan menyediakan hasil penelitian dan pengembangan berbasis spasial, yang dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan Mitigasi bencana.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim adalah :

- a. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan bidang kepakaran Sistem Informasi Geografis untuk mendukung Riset dan pengembangan inovasi yang berbasis spasial.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Sistem Informasi Geografis.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tiga tahun mendatang. Berdasarkan dari rumusan masalah utama, masalah dan akar masalah tersebut di atas, isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim ke depan adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
2. Peningkatan pengembangan inovasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Sesuai dengan Tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk pencapaian Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

Berdasarkan isu strategis, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim di masa yang akan datang adalah “ **Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Yang Optimal** “ dengan tolok ukur “ Jumlah Penerapan Hasil Riset yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah”.

Tujuan tersebut tercapai jika jumlah **Hasil Riset** yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah dan jumlah **Hasil INOVASI** yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsih untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rekomendasi hasil riset dan pengembangan inovasi untuk pencapaian seluruh Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : **Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat**, dengan tolok ukur “Jumlah Hasil Riset yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Hasil Inovasi yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Diterapkan dalam arti bahwa Hasil Riset dan Inovasi yang dilaksanakan akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.	Riset	1	3	6
	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.	Inovasi	1	3	6
Sasaran : Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	5	10
	Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	5	10

Keterangan : Tabel tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang mendukung urusan Balitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Non Urusan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
TUJUAN : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	86	86
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Poin	75 (BB)	77,5 (BB)	80 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	84	85

Keterangan : Tabel tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang mendukung non urusan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur atau bersifat rutin pada sekretariat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah atau rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Strategi dan Arah kebijakan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024-2026, tampak pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan RPD Provinsi Kaltim :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan SDM Berdaya Saing; 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi 			
Sasaran RPD Provinsi Kaltim :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Menurunnya tingkat pengangguran 4. Meningkatnya daya saing perempuan 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi 6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin 7. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar 8. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan 10. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 11. Terwujudnya Birokrasi yang professional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal	1. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi Oleh Perangkat Daerah Dan Masyarakat	1. Membuat Regulasi Yang Mengatur Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Riset, Inovasi dan Pemajuan IPTEK 2. Meningkatkan Sosialisasi dan pemahaman terhadap hasil Riset dan Inovasi

			<p>3. Penciptaan system pembinaan dan pengawasan (binwas) berbasis elektronik/teknologi kepada kab/kota</p> <p>4. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan terkait perumusan kebijakan pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi</p>
		<p>2. Mengembangkan Produk Riset dan Inovasi yang lebih aplikatif</p>	<p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perisest dan Inovator</p> <p>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p> <p>3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kelitbangnan Secara periodik</p> <p>4. Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Menghasilkan Publikasi Ilmiah/Buku/Naskah Akademik/Prosiding di nasional dan Internasional</p> <p>5. Pembentukan Sentra HAKI</p>

		<p>3. Mengembangkan produk-Produk Riset dan Inovasi Yang Ditujukan Untuk Penyelesaian Permasalahan Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Berfokus Pada Konsep Scienced Based Policy Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi riset dan Inovasi Daerah Berbasis Teknologi Yang Terpadu (IRIS) 3. Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan Stakeholders Dalam Menghasilkan Produk Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4. Peningkatan Kapasitas Perekayasaan IPTEK
		<p>4. Peningkatan Komitmen dan Kerjasama Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Skema Pendanaan Riset dan Pengembangan Inovasi Serta Teknologi Lintas Wilayah Dan Lintas Sector 2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pemahaman Terhadap Pengembangan Inovasi 3. Peningkatan kemitraan (Pemerintah dan Swasta) Dalam Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penerapan Standar Penilaian Indeks Inovasi Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN: Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal

SASARAN: Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi Oleh Perangkat Daerah Dan Masyarakat

<p>STRATEGI 1.2.2 Membuat Regulasi yang mengatur pelaksanaan dan pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi</p>	<p>STRATEGI 2.2.2 Mengembangkan Produk Riset dan Inovasi yang lebih aplikatif</p>	<p>STRATEGI 3.2.2 Mengembangkan Produk-produk Riset dan Inovasi yang ditujukan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan</p>	<p>STRATEGI 4.2.2 Peningkatan Komitmen dan kerjasama pengembangan Riset dan inovasi daerah</p>
<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Riset, Inovasi dan Pemajuan Iptek. 2. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terhadap hasil riset dan inovasi. 3. Penciptaan sistem pembinaan dan pengawasan (binwas) berbasis elektronik/teknologi kepada kab/kota. 4. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan terkait perumusan kebijakan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. 	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Periset dan Inovator. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Riset, pengembangan inovasi dan teknologi. 3. Peningkatan Monitoring dan evaluasi hasil kelitbang secara periodik. 4. Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/ buku/ naskah akademik/ prosiding di nasional dan internasional. 5. Pembentukan Sentra HAKI. 	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Riset dan inovasi daerah berfokus pada konsep <i>science based policy</i> untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan kepala daerah. 2. Pengembangan sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi yang terpadu (IRIS). 3. Peningkatan pelatihan dan pendampingan stakeholders dalam menghasilkan produk Riset, pengembangan inovasi dan teknologi. 4. Peningkatan Kapasitas perekayasa IPTEK. 	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Skema pendanaan riset dan pengembangan inovasi serta Teknologi, lintas wilayah dan lintas sektor. 2. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terhadap pengembangan Inovasi. 3. Peningkatan kemitraan (Pemerintah dan swasta) dalam Riset, pengembangan inovasi dan teknologi. 4. Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi dalam penerapan standar penilaian indeks inovasi daerah.

Gambar 5.1 Tujuan, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD dibutuhkan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim tahun 2024-2026.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih bersifat indikatif. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Nomenklatur program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.1 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

1.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi di Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi Penilaian Perang Daerah Terbaik

1.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi Panji-Panji Keberhasilan dan Tokoh Berjasa

1.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset reformasi birokrasi

- 1.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset POLHULKAM Kaltim

- 1.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset Penerapan Desa Binaan

- 1.1.7 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset model hubungan desa dengan kecamatan dan kabupaten

- 1.1.8 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset model pengembangan aparatur desa

- 1.1.9 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset pengembangan pengelolaan keuangan dan asset desa

- 1.1.10 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset Pemerintah Desa, BUMDES, Industri dan Kemandirian Desa

- 1.1.11 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil aplikasi data dan laporan

- 1.1.12 Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait naskah kebijakan

- 1.1.13 Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil ata Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan

- 1.1.14 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil rekomendasi peneliti asing
- 1.2 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang sosial dan kependudukan
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian permasalahan sosial di Kaltim
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Perempuan ,Anak, Lansia, Disabilitas dalam Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian pendidikan dan daya saing SDM di Kaltim, Sumber Daya Budaya di Kaltim Menjadi Warisan Dunia (Haritage)
 - 1.2.4 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Pemuda dan Olahraga
 - 1.2.5 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian pengembangan pariwisata
 - 1.2.6 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kesehatan Masyarakat Di Kaltim
 - 1.2.7 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian kependudukan
 - 1.2.8 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Administarsi Kependudukan Di Kaltim

1.2.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kebutuhan Dunia Usaha Terhadap Tenaga Kerja Di Kaltim

1.2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daerah

1.2.11 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Transmigrasi Di Kaltim

1.3 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang ekonomi dan pembangunan

1.3.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif Di Provinsi Kalimantan Timur, Identifikasi Kinerja Kelembagaan Koperasi di Kalimantan Timur, identifikasi kinerja pemasaran digital dalam peningkatan pendapatan umkm di Kalimantan Timur

1.3.2 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian sumber Daya Wilayah Untuk Pengembangan Industri Di Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan model industri pariwisata di Kalimantan Timur, Analisa Pasar Destinasi Pariwisata Kalimantan Timur

1.3.3 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan BUMD Sektor Kehutanan, riset BUMD

1.3.4 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Optimasi Peningkatan Produksi Padi, dan Pengembangan Produk Pangan di Kalimantan Timur, Identifikasi Jaringan Irigasi di Kalimantan Timur, Identifikasi Penerapan Teknologi Pertanian Modern di Kalimantan Timur

1.3.5 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy, Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan, Identifikasi Kebutuhan Armada Penangkapan Ikan di Kalimantan Timur

1.3.6 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Dampak Transisi Energi Terhadap Tenaga Kerja Sektor Batubara dan Migas di Kalimantan Timur, Identifikasi Mineral Tanah Jarang di Kalimantan Timur (Lanjutan), Pengembangan Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Biogas, Analisis Potensi Energi Sampah Sebagai Energi Terbarukan

1.3.7 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Mitigasi Bencana Terkait Lingkungan di Kalimantan Timur, Identifikasi Pencemaran Sungai di Provinsi Kalimantan Timur, Pengelolaan Lingkungan dan Ancaman Bencana di Wilayah Pesisir

1.3.8 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Analisis Dampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur dan Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat Sekitar IKN, Analisis Pengembangan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kalimantan Timur, Analisis Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur

1.3.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pemantapan Material Lokal Dalam Campuran Aspal Panas, Identifikasi Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kalimantan Timur, Identifikasi Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kalimantan Timur

1.3.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kinerja Sisa Umur Jalan Wilayah Utara Kalimantan Timur, Identifikasi Kendaraan ODOL dan Penanganannya di Kalimantan

Timur, Identifikasi Kelengkapan Fasilitas Jalan Provinsi di Wilayah Utara Kalimantan Timur

1.3.11 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Analisis Potensi Penembangan Permukiman dan Perumahan Pada Kawasan Wilayah Pengembangan Ibukota Negara, Identifikasi Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan Kalimantan Timur, Konsep Bermukim Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Desa Long Anai Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3.12 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi dan Konflik Agraria Pasca Ibukota Negara, Perubahan Penggunaan Lahan Pada Kawasan Penyangga Ibukota Negara, Evaluasi Struktur Ruang Pada Kota dan Kabupaten Daerah Mitra Ibukota Negara

1.3.13 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Smart Province di Kaltim, Riset Komunikasi dan Informatika

1.4 Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang pengembangan inovasi dan teknologi

1.4.1 Sub Kegiatan Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja riset atau kajian Potensi Ketersediaan Air Bersih di Daerah Penyangga IKN, Riset Potensi Pengembangan EBT Berbasis Kelapa Sawit (POME) otensi Pengembangan EBT Berbasis Tenaga Bayu, Riset Pemanfaatan Teknologi Nutrient Film Technique sebagai Penyokong Pangan Bergizi, Riset Pakan Ternak dan Perikanan Berbasis Bahan Lokal, Riset Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS di Kaltim, Riset Penetapan Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Daerah, Riset Potensi Pemanfaatan Pasir Kuarsa untuk mendukung Bauran EBT di Kaltim

1.4.2 Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Uji Coba Prototipe Pengolahan Limbah Daun Nanas Menjadi Serat, Uji Coba Prototipe Pembasmi Hama Otomatis, Fasilitasi Workshop Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Teknologi Pakan Ternak dan Perikanan Berbasis Bahan Lokal, Fasilitasi Workshop Inovasi

1.4.3 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Penjaringan Inovasi (Pepes Ikan Peda) dan Pelaksanaan Quick Win 1 PD 1 Inovasi, Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah, Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Inovasi,

1.4.4 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja tentang Penerbitan Jurnal Riset Pembangunan, Ekspose Hasil Riset Bidang Inovasi dan Teknologi, Pelaksanaan Pameran/Expo Dalam Rangka Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Riset

1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen seperti Renstra, Renja dan Perubahan Renja

2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen RKA Murni

2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Perubahan RKA

2.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan DPA murni

2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA

2.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan LKjIP dan SAKIP

2.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan evaluasi renja dan evaluasi Renstra

2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan PD

Kegiatan ini diperuntukan penyelesaian administrasi keuangan PD

2.2.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan Dokumen SPJ Honor ASN seperti Honor PA/KPA/PPTK, PBJ, Pengurus Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pembantu penerimaan, Bendahara pembantu pengeluaran

2.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD

2.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi PD

2.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD

2.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diperuntukan bagi penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 2.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD
- 2.3.2 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah PD
- 2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Penilaian Barang Milik Daerah PD
- 2.3.4 Sub Kegiatan Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.5 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.6 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.7 Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah PD
- 2.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini diperuntukkan penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sub kegiatan ini diperuntukan pembelian Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub kegiatan ini diperuntukan penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.4.3 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 2.4.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2.4.5 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- 2.4.6 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.4.7 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pelaksanaan pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini diperuntukan pembelanjaan Komponen Instalasi Listrik
 - 2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini diperuntukan pembelanjaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti flashdisk, tinta printer, umbul-umbul dll
 - 2.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Peralatan Rumah Tangga seperti alat kebersihan taman dan toilet kantor
 - 2.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini diperuntukan belanja bahan logistic kantor
 - 2.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.5.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini diperuntukan belanja tamu
 - 2.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja perjalanan dinas dalam dan luar kaltim, luar negeri

2.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD

2.5.9 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan mebel

2.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.6.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

2.6.7 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

2.6.8 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pengadaan mebel

2.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Surat Menyurat

2.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa pelayanan umum kantor

2.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan.

2.8.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.

Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal				Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	1 Riset	1 Riset		3 Riset		6 Riset		6 Riset			
				Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	N/A	1 Inovasi		3 Inovasi		6 Inovasi		6 Inovasi			
	Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi Oleh Perangkat Daerah Dan Masyarakat			Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	N/A	2 Riset		5 Riset		10 Riset		10 Riset			
				Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	N/A	2 Inovasi		5 Inovasi		10 Inovasi		10 Inovasi			
		5 5 2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	N/A	70%	7.235.000.000	72%	8.367.675.000	75%	10.644.350.000	75%	15.602.675.000	Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Bidang Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim
			Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	N/A	65%	66%		67%		67%					
		5 5 2 1.01	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	1.193.000.000	4%	1.407.950.000	5%	1.891.170.000	5%	4.492.120.000		
		5 5 2 1.01 1	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	N/A	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	228.500.000	3 Laporan	578.500.000		
		5 5 2 1.01 2	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	228.500.000	5 Laporan	528.500.000		
		5 5 2 1.01 3	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	228.500.000	3 Laporan	528.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		5	5	2	1.01	4	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	52.690.000		
		5	5	2	1.01	5	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	3 Laporan	2 Laporan	110.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	185.900.000	3 Laporan	445.900.000		
		5	5	2	1.01	6	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	7	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	0	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	200.950.000	1 Laporan	295.750.000	3 Laporan	671.700.000		
		5	5	2	1.01	8	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	9	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	10	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	11	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	0	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	397.500.000	3 Laporan	897.500.000		
		5	5	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000		
		5	5	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	4 Rekomendasi	200.000.000	5 Rekomendasi	250.000.000	5 Rekomendasi	313.000.000	14 Rekomendasi	763.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000
		Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	0	1 Rekomendasi	1.000.000	1 Rekomendasi	1.000.000	1 Rekomendasi	1.690.000	3 Rekomendasi	3.690.000
		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	1.382.000.000	4%	1.577.000.000	5%	1.932.980.000	5%	4.891.980.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	1 Dokumen	325.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	499.250.000	3 Dokumen	1.199.250.000
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	314.690.000	3 Dokumen	765.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	433.900.000	4 Dokumen	1.133.900.000
		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	290.250.000	3 Dokumen	765.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	52.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	248.000.000	1 Dokumen	384.750.000	3 Dokumen	907.750.000
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	52.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	2.100.000.000	4%	2.392.500.000	5%	3.021.400.000	5%	7.513.900.000
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	585.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	140.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	745.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	271.400.000	3 Dokumen	641.400.000
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6	6 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	745.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	650.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	172.500.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	572.500.000
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	670.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	595.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	190.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	NA	11%	2.560.000.000	11%	2.990.225.000	12%	3.798.800.000	12%	9.349.025.000
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	2 Dokumen	760.000.000	3 Dokumen	1.140.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	8 Dokumen	3.100.000.000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	2 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	548.800.000	5 Laporan	948.800.000
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	3 Laporan	1.150.000.000	3 Laporan	1.200.000.000	3 Laporan	1.450.000.000	9 Laporan	3.800.000.000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	400.000.000	9 Laporan	1.000.000.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.225.000	1 Laporan	200.000.000	3 Laporan	500.225.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,50 (BB)	78,50 (BB)		79,30 (BB)		80,01 (A)		80,01 (A)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	83 Indeks	85 Indeks		86 Indeks		86 Indeks		86 Indeks	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	61,26 (B)	75 (BB)		77,50 (BB)		78,10 (BB)		78,10 (BB)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	83 Indeks	83 Indeks		84 Indeks		85 Indeks		85 Indeks	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	83 Indeks	23.765.000.000	84 Indeks	26.382.325.000	85 Indeks	24.874.400.000	85 Indeks	75.021.725.000
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	80%	375.000.000	85%	487.500.000	90%	487.500.000	90%	1.350.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	65.000.000	10 Dokumen	65.000.000	30 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	21 Laporan	75.000.000	21 Laporan	97.500.000	21 Laporan	97.500.000	63 Laporan	270.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	65.000.000	5 Laporan	65.000.000	15 Laporan	180.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0%	0,18%	10.773.000.000	0,08%	11.344.900.000	0%	11.394.900.000	0%	33.512.800.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	10.500.000.000	50 Orang/Bulan	11.000.000.000	50 Orang/Bulan	11.000.000.000	145 Orang/Bulan	32.500.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	36 Bulan	750.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	36.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	36.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.900.000	1 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	10.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	30 Laporan	50.000.000	30 Laporan	65.000.000	30 laporan	65.000.000	90 laporan	180.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	N/A	20%	24.000.000	15%	31.000.000	10%	31.000.000	10%	86.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	11.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	11.000.000
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	3 Laporan	11.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	11.000.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	36 Laporan	42.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40%	40%	355.000.000	50%	305.000.000	70%	430.000.000	70%	1.090.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	2 Paket	160.000.000	1 Paket	85.000.000	2 Paket	160.000.000	5 Paket	405.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	25 Orang	125.000.000	30 Orang	150.000.000	35 Orang	200.000.000	90 Orang	475.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	90 Orang	180.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75%	75%	2.340.000.000	85%	3.562.000.000	95%	4.512.000.000	95%	10.414.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000	1 Paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	3 paket	250.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	3 paket	350.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	26.000.000	3 paket	72.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1 paket	30.000.000	1 Paket	39.000.000	1 paket	39.000.000	3 paket	108.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.000.000	1 Paket	117.000.000	1 paket	117.000.000	3 paket	324.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	104.000.000	1 Laporan	104.000.000	3 Laporan	288.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000	12 laporan	2.675.000.000	12 Laporan	3.700.000.000	36 Laporan	8.125.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	72.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	825.000.000
		kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	0%	30%	5.903.000.000	70%	6.055.925.000	100%	2.155.000.000	100%	14.113.925.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 Unit	500.000.000	2 Unit	1.000.000.000	0 Unit	-	3 Unit	1.500.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.300.000	1 Unit	1.300.000	3 Unit	3.600.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1 paket	370.000.000	1 paket	78.000.000	1 Paket	458.700.000	3 Paket	906.700.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit	380.000.000	10 Unit	1.381.625.000	12 Unit	1.500.000.000	27 Unit	3.261.625.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	4.502.000.000	1 Unit	3.400.000.000	0 Unit	-	2 Unit	7.902.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000	3 Unit	360.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	65.000.000	3 Unit	180.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100%	100%	3.290.000.000	100%	3.537.000.000	100%	3.537.000.000	100%	10.364.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	39.000.000	12 Laporan	39.000.000	36 Laporan	108.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	520.000.000	36 Laporan	1.440.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	78.000.000	36 Laporan	216.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	2.800.000.000	35 Laporan	2.900.000.000	35 Laporan	2.900.000.000	83 Laporan	8.600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60%	60%	705.000.000	70%	1.059.000.000	80%	2.327.000.000	80%	4.091.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	2 Unit	75.000.000	6 Unit	210.000.000	6 Unit	210.000.000	6 Unit	495.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	400.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	70 Unit	140.000.000	80 Unit	182.000.000	90 Unit	250.000.000	90 Unit	572.000.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.125.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	4 Unit	325.000.000	6 Unit	600.000.000	6 Unit	1.175.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40.000.000	3 Unit	52.000.000	3 Unit	52.000.000	3 Unit	144.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	180.000.000
TOTAL ANGGARAN						31.000.000.000		34.750.000.000		35.518.750.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kaltim yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Balitbangda Prov. Kaltim yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Prov Kaltim 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	TUJUAN 1 : Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal						
	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	0	1	3	6	6
	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	0	1	3	6	6
II	SASARAN 1 yang mendukung tujuan 1 : Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat						
	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	0	2	5	10	10
	Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	0	2	5	10	10
III	TUJUAN 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84	85	86	86	86
IV	SASARAN 2 yang mendukung tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Poin	70 (B)	75 (BB)	77,50 (BB)	78,10 (BB)	78,10 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	82	83	84	85	85
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	0	70	72	75	75
	Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	0	65	66	67	67
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	83	84	85	85
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009